



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : Produksi Tersendat  
**Tanggal** : Sabtu, 12 Februari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 10

Kompas\_12\_02\_22\_h.10\_produksi\_tersenddat

### Produksi Tersendat

Harga minyak goreng berangsur turun meskipun masih di atas harga eceran tertinggi. Harga rata-rata minyak goreng kemasan sederhana turun 9,68 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Belum lan-

carnya pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya disebabkan oleh tersendatnya produksi sejumlah pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan industri perkebunan kelapa sawit. Tingginya harga minyak kelapa sawit mentah membuat mereka kekurangan pasokan. Subsidi pun diusulkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit ditetapkan Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Harga itu berlaku sejak 1 Februari 2022.

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan olein atau CPO olahan sebesar 20 persen dari total volume ekspor dengan patokan harga CPO Rp 9.300 per kilogram (kg) dan olein Rp 10.300 per kg. Regulasi itu diterbitkan guna mengendalikan harga minyak goreng di tengah lonjakan harga CPO internasional.

Namun, di sejumlah toko, pasar tradisional, pasar modern, dan minimarket, minyak goreng dengan harga sesuai HET masih sulit dicari. Di sejumlah pasar, penjual mematok harga di atas HET karena minyak goreng yang dijual merupakan stok lama atau sebelum HET diberlakukan. Di pasar modern, minyak goreng sawit kerap dijual terbatas serta cepat habis.

Di minimarket juga kerap kali tak ada stok.  
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, saat dihubungi, Jumat

(11/2/2022), mengatakan, kewajiban DMO sebesar 20 persen dari total volume ekspor setiap eksportir sudah diterapkan. Namun, hal itu tetap belum bisa mengatasi permasalahan. Tingginya harga CPO internasional, sekitar Rp 15.000 per kg, membuat 10 pabrik minyak goreng yang tak terintegrasi dengan industri perkebunan sawit—empat di antaranya anggota GIMNI dan tiga anggota Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI)—tak dapat berproses atau tersendat.

“(Mereka tak bisa berproses) Karena tidak ada CPO yang bisa dibeli di harga Rp 9.300 per kg (harga patokan DMO). Mereka kelabakan mencari ke mana-mana dan tak punya solusi. Lokasi mereka, empat di Sumatera dan enam di Jawa,” ujar Sahat.

“Jalur-jalurnya juga tidak mudah. Kita negara kepulauan, bukan semenanjung seperti Malaysia. Hambatan pada logistik itu yang membuat lambatnya penetrasi dan pengisian pasar domestik,” katanya.

Ia mengusulkan pemerintah menerapkan skema subsidi bagi pabrik-pabrik yang tak terintegrasi dengan industri sawit itu. Dalam perhitungannya, ada selisih Rp 7.000 antara harga CPO internasional plus PPn dan harga agar minyak goreng dapat dijual sesuai HET. Dalam sebulan diperkirakan ada kebutuhan 55.000 kiloliter atau 62.000 ton CPO.

“Apabila dikalikan, ada kebutuhan sekitar Rp 434 miliar per bulan. Itu disubsidi. Kami usulkan PTP (PT Perkebunan Nusantara) karena dia besar dan perusahaan negara. Kalau ditunjuk langsung, kan, bisa cepat kerja. Kalau swasta bisa alasan. PTP pun tidak akan rugi karena menjual harga pasar, yang kemudian ditutup dengan subsidi tadi,” ujar Sahat.

Sebelumnya, dalam Dialog Pelayanan Publik “Menjamin Ketersediaan Minyak Goreng”, Selasa (8/2), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menuturkan, pihaknya memahami, harga minyak goreng di sejumlah daerah masih tinggi dan stoknya terbatas. Namun, situasi itu hanya semen-

tara karena pedagang panik akan stok lama yang sudah dibeli dengan harga tinggi. "Harga tinggi karena para pedagang ingin menghabiskan stok dulu. (Fenomena) Ini pasti sesaat karena pedagang ini berusaha habiskan stok lama. Lalu ada panic buying. Distribusi ke pasar tradisional belum lengkap dan di ritel modern terjadi rush, sedangkan pasokan tersendat. Namun, ini sangat sementara. Saya pastikan seminggu ke depan sudah lancar," tuturnya.

Berangsur turun

Harga minyak goreng berangsur turun meskipun masih di atas HET baru. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional minyak goreng curah pada 10 Februari 2022 adalah Rp 16.600 per liter, turun 7,78 persen dibandingkan sebulan sebelumnya yang sebesar Rp 18.000 per liter. Harga rata-rata minyak goreng kemasan sederhana juga turun sebesar 9,68 persen selama sebulan terakhir ini dari Rp 18.600 per liter pada 10 Januari 2022 menjadi Rp 16.800 per liter pada 10 Februari 2022.

Selain menerapkan kebijakan kewajiban DMO minyak kepala sawit mentah dan olein, Kementerian Perdagangan dan ID Food, holding BUMN kluster pangan, juga menggelar operasi pasar minyak goreng. Harga minyak goreng yang didistribusikan sesuai dengan HET. Pada Kamis (10/2), ID Food mendistribusikan 57,5 ton (61.640 liter) minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sebelumnya, ID Food telah menggelontorkan

12

ton

(12.864 liter) minyak goreng curah di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, pekan lalu.

Direktur Utama ID Food

Arief Prasetyo Adi menuturkan, pendistribusian minyak goreng itu akan dilaksanakan bertahap secara berkelanjutan. Hal itu dilakukan guna memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng murah untuk masyarakat.

"Kami sudah memetakan titik-titik pendistribusiannya.

Nanti secara bertahap, pendistribusian itu akan menjangkau semua kota di Indonesia," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu malam.

Dugaan kartel

Ketua Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempercepat penyelidikan adanya dugaan kartel dan persaingan usaha tidak sehat terkait minyak goreng. Meski sudah bergerak, ia menilai belum ada spirit yang kuat dari KPPU untuk membongkar dugaan itu.

Sebelumnya, KPPU telah meneliti hal itu karena diduga ada praktik kartel untuk menaikkan harga minyak goreng bersama-sama. Dari penelitian, diketahui 46,5 persen pasar dikuasai empat produsen minyak goreng. Pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga pelaku usaha terintegrasi.

"Saat ini, empat produsen besar sudah memenuhi panggilan KPPU. Kami masih mengagendakan beberapa panggilan produsen lainnya minggu depan serta meminta keterangan pemerintah. Proses penggalian alat bukti masih terus berjalan," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, Jumat.

Sahat menampik hal itu.

"Harga sawit ditentukan pasar internasional. Jadi, murni mekanisme harga pasar internasional. Minyak goreng premium juga dipasok 61 perusahaan," ucapnya. (DIT/HEN)